

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan¹. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat².

Pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif merupakan cara melatih masyarakat memiliki kesadaran berdemokrasi. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Pemilu menunjukkan adanya pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis. Rakyat Indonesia dapat turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pemilu membuat kehidupan politik di Indonesia lebih terakomodasi. Warga negara merupakan substansial yang penting dalam pelaksanaan pemilu, karena pada dasarnya kekuatan pemilihan masyarakat menentukan nasib negara ke depannya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilu, baik warga negara dengan latar belakang suku, agama, ras, status sosial,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 106.

² *Ibid* hlm. 461.

status pendidikan, dan golongan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 BAB X Warga Negara Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik”.

Pada tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang di mana akan diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali dan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu di tahun 2019 adalah Provinsi Jambi. Berkaca dari pemilu pada tahun 2014 Provinsi Jambi berhasil melaksanakan pemilu dengan persentase tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77.25% yang dimana hasil tersebut didapat dari rata-rata perolehan suara Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Berikut adalah tabel persentase tingkat partisipasi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi:

Pemilu menjadi indikator suatu negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah negara yang memberikan keluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilannya di parlemen menandakan negara tersebut telah berupaya berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi melalui kegiatan Pemilu mensyaratkan warga untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi. Di beberapa negara, dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering menjadi topik utama diskusi sebuah negara demokrasi.

Hal tersebut berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk Pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dan menjadi perwakilan di parlemen. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Tabel 1
Tingkat Partisipasi Pemilih Perkabupaten di Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Persentase
1	Kerinci	77.53%
2	Merangin	80.95%
3	Sarolangun	81.54%
4	Batang Hari	80.33%
5	Muaro Jambi	76.67%
6	Tanjab Barat	76.43%
7	Tanjab Timur	78.54%
8	Bungo	77.96%
9	Tebo	82.37%
10	Sungai Penuh	75.99%
11	Kota Jambi	69.00%
Tingkat partisipasi per Kabupaten/Kota		

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi Pemilihan Umum di Provinsi Jambi pada tahun 2014 didapati rata rata tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Jambi mencapai 77,3%, yang dimana hal tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jambi yaitu sebesar 75%. Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang memiliki tingkat partisipasi tiga teratas yaitu, Kabupaten Bungo dengan tingkat partisipasi 82,37%, Kabupaten Sarolangun dengan tingkat partisipasi 81,54%, Kabupaten Merangin dengan tingkat partisipasi 80,95%. Sementara Kabupaten/Kota dengan tingkat partisipasi tiga terendah meliputi Kota Jambi dengan tingkat partisipasi 69,00%, Kota Sungai Penuh dengan tingkat partisipasi 75,99%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat partisipasi 76,43%.

Partisipasi juga merupakan suatu pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul seperti yang tetuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya” ditetapkan dengan undang-undang. Pengaruh agama, budaya, rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat bawah masih menjadi penghambat upaya pembangunan kekuatan *civil society* sebagai pilar demokrasi.³

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi Indonesia. Sama halnya dengan daerah lain yang berada di Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan pesta demokrasi

³ Elizabeth Kumala Dewi, *Tanpa Civilian Supremacy, Reformasi Hanya Mimpi*, artikel diakses pada 2 januari 2008 pukul 02.00 WIB dari <http://www.inovasionline.com>.

pemilu tahun 2019. Dilihat berdasarkan pemilu sebelumnya pada tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tingkat partisipasi sebesar 76.43% dan menempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten dengan tingkatan partisipasi tiga terendah di bandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Pada Pemilu tahun 2019 ini pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan daftar pemilih tetap melakukan dua kali pendataan, yang di mana pada tahap pertama atau DPTH-1 pihak KPU Tanjung Jabung Barat menetapkan DPT berjumlah 205.209. Kemudian pada penetapan DPT tahap kedua atau DPTH-2 di jumlah DPT tersebut mengalami peningkatan menjadi 216.362.

Dengan kenyataan berdasarkan pemilu 2014 yang menempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten dengan tingkat partisipasi tiga terendah di Provinsi Jambi maka pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun dalam perakteknya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu juga di bantu oleh stakeholder, adapun salah satunya adalah aparat pemerintahan desa. Yang dimana perangkat desa adalah garda terdepan komisi pemilihan dalam mensukseskan pemilu. Dengan dilibatkannya stakeholder diharapkan pekerjaan komisi pemilihan umum menjadi lebih ringan dalam menyukseskan pemilu.

Adapun permasalahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya dialami oleh Provinsi Jambi saja, hal tersebut terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil yang berjudul "*Peran*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014". Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori peran (*Role Theory*), ditarik kesimpulan KPUD Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014 melakukan upaya upaya seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, penyebaran informasi melalui alat peraga, sosialisasi melalui media teori komunikasi organisasi dan masa, program relawan demokrasi, sosialisasi mobil keliling⁴. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi, tahun yang berbeda dan ruang lingkup pemilihan yang berbeda yang dimana apabila ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden sementara penulis pada penelitian ini ruang lingkungnya adalah pemilu di tahun 2019.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amalia Widaningtias pada tahun 2017 yang berjudul "*Strategi Komunikasi Dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota 2017*". Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan teori komunikasi organisasi dan perencanaan strategi komunikasi, ditarik kesimpulan bahwa: KPU Kota Yogyakarta telah berhasil memenuhi target peningkatan angka Partisipasi pada Pilkada 2017. Untuk meningkatkan Partisipasi tentunya diperlukan sebuah strategi. Strategi yang matang harus dibuat oleh KPU Kota Yogyakarta dalam menejemen kepemiluan 2017. Strategi juga dapat

⁴ Muh Imam Adli Aqil, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*, Progam Sarajana Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015, artikel diakses 17 Maret 2019 dari repositori.uin-alauddin.ac.id

mengaplikasikan tujuan dari sebuah instansi dalam bentuk program. Sehingga dapat menimbulkan dampak yang nyata. Pengaplikasian strategi perlu dikomunikasikan kepada khalayak. Agar dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang besar melalui transfer ide-ide baru⁵. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokasi, tahun penelitian yang berbeda dan ruang lingkup pemilihan yang dimana apabila ruang lingkup penelitian ini adalah pemilihan walikota sementara penulis disini adalah pemilihan umum 2019. Adapun jenis penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan Undang Undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Undang Undang tersebut KPU berperan untuk menyukseskan Pemilu termasuk juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum sebesar 77,5%. Adapun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam tingkat partisipasi tiga terendah di Provinsi Jambi, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul *“Peran KPU Tanjung Jabung Barat Dalam Melaksanakan Sosialisasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019”*.

⁵ Amalia Widaningtias, *“Strategi Komunikasi Dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota 2017”* Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Kalijaga 2017, artikel diakses 4 April 2019 dari repositori.uin-sunankalijaga.ac.id

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran Komisi Pemilihan Umum KPU Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih pemula pada pemilihan Praiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan dari penelitian, yaitu : untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stakeholders dalam menyukseskan pemilihan umum.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Beritik tolak dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian penelitian adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1.4.1. Manfaat Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai *referensi* bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stakeholders dalam menyukseskan pemilihan umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai pembangun pemikiran serta informasi mengenai mengetahui peran KPU

Tanjung Tabung Barat dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih pemula.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Pasal 18 tentang pemilu, di dalam undang undang tersebut diatur tugas KPU Kabupaten/Kota yang dimana tugas tersebut meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dikahui berdasarkan undang undang Nomor. 7 Tahun 2017

pasal 18, pada pasal tersebut disebutkan salah satu tugas KPU adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang dimana sosialisasi tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pemilu.

Definisi peran

Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah drama.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁶. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala

⁶ Soerjono Soekanto, *teori peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm. 243.

teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).⁸

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.⁹

1.5.2. Partisipasi Politik

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 4.

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)¹⁰.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi¹¹.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 367.

¹¹ Cohen and Uphoff, *Rural Development Participation* (New York: Cornel University,1977) hlm 213-235. Dalam Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta :UNY , 2011) hlm 61-63.

sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

- 1) Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, adalah orang yang sedikit-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- 3) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- 4) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional¹².

¹² H.A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 289.

Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya¹³.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menjelaskan partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence goverment decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or ilegal, effective or ineffective*)¹⁴.

1.5.3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

¹³ Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007) hlm. 150.

¹⁴ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 4.

1. Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat . Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

2. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama.

Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal. menekankan peranan interaksi dalam teorinya.

1.5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi.

1. Faktor Eksternal

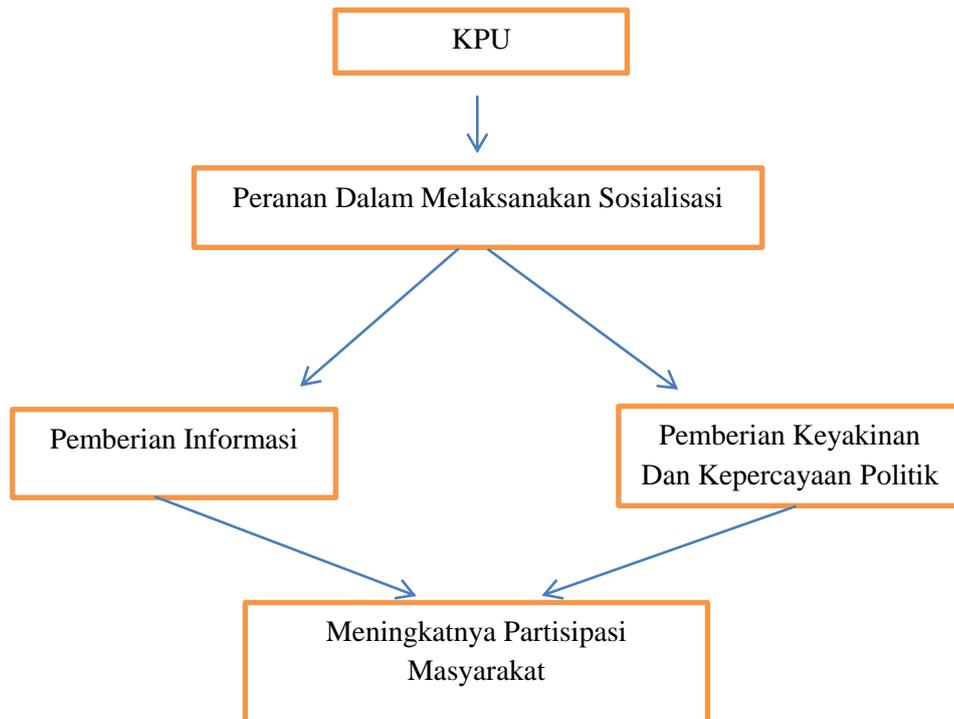
Faktor eksternal pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Faktor eksternal ini dapat berupa norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat.

2. Faktor Internal

Pada hakikatnya faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang melakukan proses sosialisasi. Wujud nyata dari faktor internal antara lain dapat berupa pembawaan ataupun warisan biologis termasuk kemampuan yang ada pada diri seseorang.

1.6. Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019



1.7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode ini memahami fenomena sosial yang akan diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis faktual dan akurat serta menunjukkan data yang otentik.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan penelitian bersifat eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi¹⁵

Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana pengumpulan data akan dilakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

1.7.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ada beberapa jenis penelitian yang dimana jenis tersebut terbagi menjadi jenis penelitian berdasarkan Bidang dan Tujuan.

Berdasarkan bidang penelitian ini merupakan penelitian akademis yang dimana penelitian ini dilakukan oleh para mahasiswa dalam pembuatan skripsi, tesis, disertasi. Penelitian ini merupakan sarana edukatif, sehingga lebih

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 6

meningkatkan validasi internal. Variabel penelitian terbatas serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan¹⁶.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian Deskriptif yang dimana nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengungkapkan data data serta informasi yang ada serta obajek yang diteliti. Adapun lokasi yang dipilih yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belang yang telah dijabarkan, didapati bahwa Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Kecamatan Muara Papalik dengan tingkat partisipasi 79.81% kemudian didapati juga Kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah adalah Kecamatan Tungkal Ilir dengan persentase partisipasi 70.19% dan Kecamatan Batang Asam sebagai Kecamatan dengan tingkat partisipasi menengah yaitu 74.83%.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang mana diharapkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam peneliti melakukan wawancara dengan dinas terkait. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan terhadap obyek penelitian yang berupa hasil dari wawancara mendalam dengan informan dan juga hasil observasi.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu¹⁷. Pertimbangan itu seperti orang yang dianggap paling paham dan mengetahui dalam kebijakan apa yang akan di lakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang terstruktur yaitu setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara ini data data yang didapat lebih akurat dan diharapkan permasalahan dapat diselsaikan denagan lebih detail.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016. Hlm. 83

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang¹⁸. Dengan dokumen tersebut tersebut diharapkan penelitian ini bisa disempurnakan. Yang dimana dokumen tersebut dapat menjadi pelengkap informasi selain dari observasi dan wawancara.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data Kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul¹⁹.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis Miles and Huberman. Metode ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi memberikan data yang jelas.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 329

¹⁹ *Ibid* hlm.336

b. Penyajian Data

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bias dilakukan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memastikan data-data yang dihasilkan telah termasuk dalam kategori-kategori yang sesuai sebagaimana telah ditentukan serta memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama²⁰. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapat dari KPU

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Alfabeta, Bandung, 2012), hlm. 330.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan data yang didapat dari masyarakat atau ormas.